

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan dengan kualitas hidup yang tinggi merupakan dambaan semua orang, dengan kemajuan teknologi manusia berharap untuk hidup lebih cepat dan efisien. Namun dengan banyaknya penduduk bentukan kota dan tingkat kepadatan yang tinggi menjadi sebuah hambatan untuk mencapai kualitas hidup tersebut. Untuk menjawab keinginan manusia akan kualitas hidup yang cepat dan mudah maka muncul berbagai metoda dan strategi untuk mencapai hal tersebut, salah satu metoda yang dapat dilakukan adalah dengan membuat sebuah kebijakan dan inovasi yang akan membawa sebuah perubahan. Pada dasarnya kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah yang berdasarkan permasalahan yang terjadi pada daerah/wilayah yang didiaminya. Menurut Suyatna (2009, hlm. 1) menyatakan bahwa “Suatu kebijakan publik tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan publik kalau ia tidak berorientasi terhadap kepentingan publik, suatu pokok pembahasan guna mengenal beberapa macam model analisis kebijakan publik.” Berdasarkan pernyataan di atas dapat digaris bawahi bahwa dalam membuat sebuah kebijakan harus berdasarkan masalah yang terjadi dan bertujuan demi kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang ataupun kelompok. Ketika membuat kebijakan ada kalanya menyesuaikan dengan perkembangan jaman, yakni dengan sebuah inovasi oleh pemerintah.

Pemerintah daerah berhak melakukan sebuah inovasi/perubahan di masing-masing daerahnya yang bertujuan untuk memajukan daerah tersebut, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah dari Pasal 386 hingga Pasal 390 Undang-undang No. 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip 1) Peningkatan efisiensi 2) Perbaikan efektivitas 3) Perbaikan kualitas pelayanan 4) Tidak ada konflik kepentingan 5) berorientasi kepada kepentingan umum 6) Dilakukan secara terbuka 7) Memenuhi

Augustan Irhamda, 2018
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DALAM MEMBANGUN WARGA
NEGARA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

nilai-nilai kepatutan dan 8) Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Akibat berkembangnya media dan teknologi maka kota-kota besar di Indonesia melakukan pembangunan dari berbagai aspek yang diintegrasikan dengan kemajuan teknologi, salah satunya Kota Bandung. Kota Bandung sebagai kota yang pertumbuhannya semakin tinggi membutuhkan sistem perkotaan yang lebih mumpuni. Pada zaman yang serba digital ini, kemampuan pengawasan dari pihak pemerintah kota perlu ditingkatkan melalui pengawasan kota yang dilakukan secara *realtime* sehingga mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kota tengah mengembangkan suatu konsep pengawasan yaitu dengan adanya program Bandung *smart city*, semua Dinas Pemerintah Kota Bandung terawasi dengan baik. Selain itu, pemerintah dituntut agar tidak buta terhadap perkembangan teknologi. Kamil (2014, hlm. 207) menyatakan bahwa “melalui kebijakan ini, birokrat tidak boleh lagi gagap teknologi (gaptek) alias jauh dari teknologi. Teknologi bukan untuk dibenci dan dijauhi. Teknologi harus dikuasai dan dimanfaatkan untuk melayani.”

Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat secara cepat dan efisien serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini sudah mulai diterapkan di kota – kota besar di Indonesia, seperti Malang, Jakarta, Manado dll. Bandung *smart city* adalah konsep sebuah kota yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota, dari permasalahan penanggulangan kemacetan, penumpukan sampah, perbaikan jalan rusak, mengetahui kontur tanah suatu daerah, apakah daerah tersebut cocok untuk didirikan bangunan atau sebagai lahan pertanian. Terlihat dari usaha pemerintah yang memasang koneksi *wifi* gratis di beberapa titik di kota, dan juga adanya aplikasi *mobile* LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang digunakan untuk menyampaikan pendapat serta penilaian masyarakat terhadap kinerja dari pemimpin mereka. Kamil (2014, hlm. 216) menyatakan bahwa “Sistem LAPOR dibuat dalam rangka mendorong keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, khususnya dalam menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat menuju reformasi birokrasi dan tata kelola. Pemerintah Kota Bandung sudah terhubung secara resmi dengan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Augustan Irhamda, 2018
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DALAM MEMBANGUN WARGA
NEGARA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Adanya fasilitas tersebut, Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung berharap tingkat partisipasi dapat meningkat, sehingga hubungan warga negara dengan pemerintah terintegrasi dengan lancar dan baik. Pola partisipasi di era digital berubah dari yang dulu dilakukan secara konvensional seperti menulis surat, menjadi non konvensional melalui teknologi berbasis digital seperti mengirim surat elektronik (*E-mail*) atau percakapan di media sosial dan juga dimudahkan dengan adanya *smart phone*. Ridwan kamil menilai bahwa Media Sosial (Medsos) merupakan sarana informasi modern saat ini untuk menyampaikan suatu informasi. Cangara (2006, hlm. 119) “Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.

Untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota berlabel *smart city* tidak mudah sehingga dalam implementasi program *smart city* masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung seperti masalah komunikasi, yakni sosialisasi pemerintah kepada masyarakat secara menyeluruh. Meski sempat melakukan sosialisasi di Hotel Trans *Luxury* pada tanggal 2 September 2016 oleh Bapak Ridwan Kamil, namun nyatanya masih banyak masyarakat Kota Bandung belum mengetahui konsep Bandung *smart city*. Selanjutnya masalah infrastruktur di daerah yang belum memadai, seperti masalah kabel jaringan (koneksi) yang saat ini masih belum merata secara keseluruhan di beberapa daerah di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung saat ini berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memperbaiki infrastruktur jaringan melalui pembangunan daktin, yaitu penurunan kabel-kabel listrik melalui pipa ke dalam bawah tanah serta membuat MCF (*microcellful*), gunanya untuk penyebar sinyal *hand phone*. Pembangunan daktin dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses pelayanan serta memperindah estetika tata ruang kota agar terlihat rapi. Supangkat (2015, hlm 102) mengemukakan bahwa “infrastruktur *smart city* adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK, seperti ketersediaan jaringan internet baik berupa serat optik, nirkabel dan kabel”.

Negara-negara di benua Eropa merupakan pelopor *smart city* di dunia. Kemudian negara lain seperti Amsterdam di Belanda, Seoul di Korea, dan Lyon di Perancis ikut menerapkan konsep *smart city*. Negara-negara tersebut membagi dimensi *smart city* menjadi beberapa bagian yang bertujuan untuk mensukseskan program *smart city* di negaranya. Supangkat (2015, hlm 2) mengemukakan bahwa “*Smart city* dapat

Augustan Irhamda, 2018

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

didefinisikan menjadi enam dimensi, yaitu *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart people*, *smart living* dan *smart governance*". Terdapat empat fase pembangunan menuju *smart city* yaitu fase pembenahan kinerja pemerintah, fase ke dua yakni mengembalikan kepercayaan masyarakat, fase ketiga yaitu pengembangan pelayanan berbasis TIK, dan fase yang terakhir yaitu pengembangan sistem dengan teknologi tinggi.

Disamping beberapa faktor di atas yang dapat mempengaruhi berjalannya program *smart city* ini harus di perhatikan faktor warga negara atau masyarakat yang ada di Kota Bandung. Warga negara harus menjadi *smart citizen* yang merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung penerapan konsep *smart city*. Setiap warga negara diharapkan menjadi pribadi yang cerdas dalam segala aspek, terutama dalam enam dimensi *smart city* yaitu *smart economy*, *smart mobility*, *smart governance*, *smart people*, *smart living* dan *smart environment*. Dengan demikian setiap indikator tersebut dapat bersinergis dan program *smart city* dapat berjalan dengan baik dan nantinya dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung dan memberikan efek positif bagi setiap warga negara yang di Kota Bandung serta menjadikan contoh kota cerdas yang mumpuni bagi kota besar lain yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, walaupun penelitian ini bukan merupakan penelitian pertama mengenai program *smart city*, peneliti memiliki ketertarikan terhadap implementasi program *smart city* di Kota Bandung, dikarenakan beberapa hal diantaranya: 1) Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan di daerahnya masing-masing 2) Mengetahui data serta implementasi program *smart city* di Kota Bandung secara *real* dan akurat 3) Membantu mensosialisasikan program *smart city* di Kota Bandung. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kajian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "***Implementasi Program Smart City dalam Membangun Warga Negara Digital***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang, adapun rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

Augustan Irhamda, 2018

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

- 1) Bagaimana rencana program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung?
- 2) Bagaimana proses program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung?
- 3) Bagaimana kendala yang dihadapi program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung?
- 4) Bagaimana solusi program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai implementasi program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yakni untuk mengetahui dan mengidentifikasi:

- 1) Rencana program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung.
- 2) Proses program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung.
- 3) Kendala yang dihadapi program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung.
- 4) Solusi program *smart city* dalam membangun warga negara digital di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat terhadap perkembangan ilmu pendidikan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

- 1) Memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu dan pengetahuan tentang program *smart city* di Kota Bandung.
- 2) Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai program *smart city* di Kota Bandung, dan untuk Mahasiswa PKn dapat memberikan tambahan pengetahuan agar dapat membantu dalam pelaksanaan program *smart city* sehingga berjalan dengan efektif dan efisien.
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat membuat segala akses dari masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih

Augustan Irhamda, 2018

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

cepat dan mudah sehingga permasalahan yang ada di kota Bandung dapat terselesaikan dengan cepat.

1.4.2 Secara Praktis

- 1) Memberikan gambaran mengenai implementasi program *smart city* di Kota Bandung.
- 2) Memberikan hasil dari implementasi program *smart city* di Kota Bandung.
- 3) Memberikan penerapan bentuk implementasi program *smart city* di Kota Bandung.
- 4) Memberikan konsep *smart city* yang diaktualisasikan melalui penerapan *civic participation* berbasis *social media*.
- 5) Memberikan partisipasi *digital citizenship* dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah kota.

1.5 Struktur Skripsi

Bab I Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

Augustan Irhamda, 2018

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA DIGITAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Peneliti memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.

Augustan Irhamda, 2018
IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART CITY* DALAM MEMBANGUN WARGA
NEGARA DIGITAL
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu